

OPTIMALISASI PERAN LOCAL WISDOM DALAM PENGEMBANGAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN MALANG

Adhinda Dewi Agustine

Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang

Email: adhinda.dewi@unmer.ac.id

Abstract

Optimizing the role of local wisdom in Minapolitan development is a reference for the implementation of development programs. For this reason, it is necessary to disseminate it to the community, especially people who are actors of development in the marine and fisheries sector. Intensive communication based on the spirit of kinship and professionalism must continue to be developed so that the results of marine and fisheries development can be enjoyed more equitably and fairly by all people of Malang Regency. Empowerment of this minapolitan is the joint responsibility of the Government, educational institutions (especially universities), bank and non-bank financial institutions, as well as the community. The availability of large potential marine and fisheries natural resources, as well as adequate quality of human resources, and adequate existence Fisheries Service institution with adequate technology support in the field of fisheries is very important to strengthen the synergy of local wisdom in Malang Regency towards a more advanced and beneficial for the community. Optimization and financial contribution to regional income in Malang Regency can be a pilot strategy from other regions that have similar cases and phenomena.

Article Histori

Accepted: 2/9/2020

Review: 29/9/2020

Publish: 31/10/2020

Keyword: *optimization, local wisdom, minapolitan development*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka mengadakan perubahan menuju kearah yang lebih baik, dengan mencakup berbagai aspek/ bidang di dalam segi kehidupan masyarakat, yang tujuan akhirnya ialah berwujud kesejahteraan masyarakat secara umum, dan salah satu indikator daripada keberhasilan sebuah pembangunan khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia adalah indikator pengukuran pembangunan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap

daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik sosial, budaya, bahkan geografisnya sehingga perlu menerapkan kebijakan yang berbeda pula. Dimana salah satu diantara potensi-potensi tersebut adalah potensi di bidang kelautan dan perikanan, dengan fungsi kelautan yang beraneka ragam tersebut maka hal itu dapat dikembangkan guna menopang peningkatan kesejahteraan manusia dengan pengakselerasian pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan, yang mana hal tersebut diyakini mampu untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan.

Penerapan Minapolitan ini bertujuan guna percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan dengan pendekatan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Dilihat dari sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Malang salah satu daerah di Jawa Timur yang mana memiliki potensi cukup besar dalam hasil tangkapan kelautan dan perikanan. Konsep Pembangunan ekonomi wilayah pesisir Kabupaten Malang adalah memberikan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut dengan memberikan pemanfaatan ruang antar sektor ekonomi secara seimbang, dan mengoptimalkan *Local Wisdom* (Kearifan Lokal) untuk sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan, ruang antar sektor dan kerusakan lingkungan, serta sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal sesuai dengan potensi sumberdaya yang terkandung dalam wilayah pesisir dan laut yang diarahkan kepada pemanfaatan ruang pesisir dan laut.

Oleh karena itu kajian optimalisasi peran *Local Wisdom* sangat penting sebagai bahan referensi bagi masyarakat ataupun pemerintah setempat dalam pengelolaan hasil kelautan dan perikanan khususnya di daerah Kabupaten Malang, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pengelolaan hasil laut serta untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan tenaga dan pikiran dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan yang lebih maju dan bermanfaat bagi masyarakat

2. KAJIAN LITERATUR

Local Wisdom (Kearifan Lokal)

Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat (*local genius*) Fajarini (2014,h.123). Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Bentuk-bentuk *Local Wisdom*

Haryanto (2014,h.212) menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragama dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan. Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014,h.13) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya

dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan.

Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014: 13) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari.

Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan rohroh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka).

Minapolitan

Pada tingkat implementasi, revolusi biru akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan, atau dengan kata lain adanya kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dari hierarki keruangan satuan system pemukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan atau agropolitan menurut Friedman dan Douglass (1985) adalah aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 150.000 jiwa .

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Konsep minapolitan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan pada umumnya menunjukkan bahwasannya di daerah pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusianyapun juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di daerah perkotaan. Pada kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak yang dinikmati di daerah perkotaan.

Dengan adanya konsep minapolitan ini pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat karena kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan perlu dikembangkan terutama di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi. Sebagaimana sentra produksi, daerah pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana daerah perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan, distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Konseptual minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara garis besar

minapolitan dapat didefinisikan sebagai konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Sementara itu, kawasan minapolitan merupakan kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Konsep minapolitan ini sendiri didasarkan pada tiga azas yaitu, demokratisasi, ekonomi kelautan dan perikanan pro-rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas (*limited state intervention*), serta penguatan daerah dengan prinsip : daerah kuat bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya benar - benar terperuntukkan demi kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam memahami permasalahan dan memecahkannya dengan tepat maka dibutuhkan suatu metode ilmiah. Pemilihan metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Miller dalam Moleong (2009) menjelaskan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Dengan mempergunakan penelitian kualitatif, data-data yang didapat akan

dianalisa dengan mempergunakan proses penalaran secara alamiah, penuturan, penafsiran dan penggambaran fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya, guna mengambil kesimpulan dan memberikan saran dengan cara menguraikan kata-kata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal merupakan salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal juga dipandang sebagai ilmu pengetahuan untuk mengatasi berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya.

Daerah pantai selatan ini merupakan penuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah, Pasuruan, bahkan menembus pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut maka harus sudah dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan aktivitas nelayan , wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

Optimalisasi *local wisdom* ini dimasudkan agar pengembangan minapolitan untuk lebih terarahkan dan lebih terlindungi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya minapolitan

merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan.

4.1 Strategi pengembangan minapolitan di Kabupaten Malang

Strategi adalah sebuah cara atau metode yang digunakan dalam mengatasi suatu permasalahan dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam perumusan strategi pada sub bab ini adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sering disebut analisis SWOT. Analisis SWOT yang nantinya disajikan sebenarnya secara tidak langsung akan menggambarkan kondisi diluar dan kedepan dari sinergitas antara Kabupaten Malang dengan masyarakat sekitar pesisir pantai Kabupaten Malang.

Dalam meningkatkan pengembangan minapolitan di Kabupaten Malang, yang pertama adalah upaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Masyarakat yang mendirikan badan usaha diharapkan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing. Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan, peran pemerintah juga harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan.

Peran pemerintah yang perlu dimainkan dalam program pemberdayaan adalah anggaran yang dikeluarkan bukan semata-mata merupakan alokasi dana sosial, namun dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha dimaksud sehingga program pengembangan yang akan dilakukan perlu dirumuskan terlebih dahulu dengan memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha.

Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan sumber daya manusia dengan menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah strategi Pemberdayaan Sumber daya manusia melalui pemberian pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP terhadap SDM yang dilakukan secara kolektif melalui pembentukan kelompok usaha bersama dan adanya kelembagaan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), proses pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif.

Setelah terbentuknya kelompok, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mulai memberikan pelatihan dan pembinaan. Dengan adanya Pembinaan dan pelatihan yang diberikan nantinya akan mempengaruhi kemampuan dan keahlian yang dimiliki pelaku usaha guna pengelolaan usaha yang dijalankan. Untuk pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup baik, karena sudah mencakup aspek manajemen usaha dan teknik budidaya yang nantinya dapat diterapkan dalam pengembangan usaha budidaya.

Hasil dari pelatihan teknik terhadap budidaya perikanan mampu meningkatkan hasil produksi dengan mengurangi jumlah produksi yang gagal panen, serta meningkatkan kualitas produksi. Pemberian bantuan modal usaha Sebagai usaha perseorangan budidaya perikanan memiliki sumber permodalan yang terbatas. Dalam rangka penguatan sumber permodalan, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bantuan permodalan berupa peralatan atau pun sarana penunjang produksi seperti bantuan bibit atau benih dan pakan, serta adanya program-program unggulan seperti program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terjadi peningkatan hasil produksi setelah adanya bantuan permodalan tersebut, sebelum adanya bantuan rata-rata produksi satu unit usaha budidaya hanya mampu menghasilkan produksi antara 350-450 kg per siklusnya dan jumlah tersebut meningkat cukup signifikan setelah adanya program bantuan modal usaha khususnya program 10000 kolam pekarangan yang mana produksi yang dihasilkan dalam satu siklus meningkat antara 1000-1300 kg. Kemudian dengan cara pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pengembangan usaha budidaya perikanan dalam hal penyediaan bibit atau benih unggul sebagai bahan baku utama usaha budidaya perikanan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Pengembangan Minapolitan khususnya di bidang budidaya perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melalui tiga strategi utama yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, pemberian bantuan modal usaha, dan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

Pemberdayaan manusia dilaksanakan secara kolektif guna efektifitas dan efisiensi proses pelatihan dan pembinaan yang akan diberikan bagi pelaku usaha budidaya perikanan yang ada. Namun, pencapaian pemberdayaan ini masih belum optimal karena terhambat dengan minimnya jumlah tenaga lapang yang ada dalam memberikan pelatihan yang mengakibatkan minimnya intensitas pelatihan yang diberikan.

Saran

Dalam bentuk mendorong optimalisasi pengembangan minapolitan yang lebih mengutamakan *Local Wisdom* di

Kabupaten Malang, diharapkan bukan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan saja yang berkontribusi tetapi dukungan dari masyarakat setempat sendiri ikut menjaga biota laut yang ada supaya tetap lestari dan sumber daya tersebut tidak tereksploitasi secara besar-besaran, juga dibutuhkan regulasi yang tepat untuk mendukung hal tersebut dan dibutuhkan kesepakatan dalam mensinergikan pengelolaan sumber hasil perikanan dengan para produsen pengolah sumber – sumber perikanan dan masyarakat sekitar pesisir.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Fajarini, U.2014.Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN)
- Friedmann, John dan Mile Douglass.1985. Pengembangan Argopolitan : Sebuah Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia. Jakarta: Lembah Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia
- Hariyanto.2014. Asessmen Pendidikan. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Krik dan Miler dalam Lexy Moleong.2005.Penelitian Kualitatif.Bandung: Remaja Roskarya
- Sarimun, Wahyudi.2014.Buku Saku Pelayanan Teknik.Depok: Garamond.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Per.12/MEN/2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup